

Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe)

Oleh:

Hayati Sofia Salmon¹

Donald K. Moninjta²

Neni Kumayas³

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang dari berbagai masalah yang terjadi terkait Stunting di Negara Indonesia serta dari berbagai isu nasional dari permasalahan Stunting di Indonesia dan peneliti tertarik dengan isu nasional serta dengan Program BKKBN dalam pencegahan Stunting dalam peraturan Presiden Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting dan melihat bagaimana koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting itu sendiri oleh karena itu peneliti ingin melihat strategi dari pemerintah dan melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan dilakukanlah penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana dan apa Strategi Pemerintah dalam mengatasi Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe studi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, Observasi lapangan, dokumentasi. Adapun teori yang di gunakan adalah teori Strategi dari bukunya Sedarmayanti (2014) terdiri dari 3 Indikator yaitu; Penentuan Rencana, Keterlibatan pemimpin puncak, Program jangka Panjang organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Startegi Pemerintah dalam Pengentasan Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah baik karena dilihat dari data yang ada dari Dinas Kesehatan dalam hal ini angka stunting yang pertahun menurun dan hal ini sudah baik, selanjutnya keterlibatan pemimpin dalam hal ini selaku pihak lintas sektor yang ada mencakup pihak pemerintah kecamatan bahkan keluarahan hingga ke kampung harus terus di tingkatkan. Yaitu selanjutnya di lihat dari setiap program sebagai program sudah berjalan dengan baik tapi ada sebagian program yang mencakup program dalam hal penggunaan aplikasi yang perlu terus bimbingan dari pihak BKKBN sendiri untuk pelatihan penggunaannya dan lebih baik menyediakan alternatif lain.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pencegahan, Stunting, BKKBN

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang Infrastruktur tetapi pembangunan berbicara tentang bagaimana membangun manusia atau pembangunan manusia. Pembangunan tidak juga berbicara mengenai fisiknya saja tapi juga tentang manusianya, pembangunan manusia seutuhnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembangunan manusia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan Kehidupan Bangsa, bahwa pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia, dan tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu untuk menyiapkan suatu manusia yang siap untuk menjadi suatu Sumber Daya Manusia di butuhkan suatu pembangunan dari manusia dimulai dari pembangunan pola asuh anak, pemberian makanan yang bergizi, dan pemenuhan gizi.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan masalah saat ini yaitu terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu Stunting, dan saat ini dilakukanlah percepatan penurunan stunting, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif,

dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, Pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan lain sebagainya.

Pembangunan itu juga harus mengarah kepada bagaimana membangun Sumber Daya Manusia itu sendiri. Apabila kita berbicara atau membahas suatu pembangunan Sumber Daya Manusia pasti disana akan kita temukan bagaimana cara untuk mensejahterakannya. Dalam suatu pembangunan manusia yang menjadi salah satu tujuannya yaitu adalah bagaimana mensejahterakan Manusia itu sendiri, memenuhi kesejahteraan yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga, serta masyarakat. Sunarti (2012)

Tujuan pembangunan di negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menciptakan suatu Bangsa yang Sejahtera dengan kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai dengan kemampuan yang di milikinya.

Dari suatu pembangunan bahkan sampai kepada Sumber Daya Manusia yang ada saat ini program pemerintah menjadi yang utama untuk keberlangsungan hidup dari warga Negara untuk menuju hidup yang

sejahtera diawali dengan setiap strategi daya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat yang ada. Dari setiap permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah program pemerintah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan dan pembangunan manusia, yaitu bagaimana setiap program menjadi suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah.

Adapun permasalahan yang sekarang ini sedang di hadapi bersama yakni, ketersediaannya Sumber Daya Manusia, atau pembangunan suatu daya manusia, Pembangunan Manusia bagaimana membangun sumber daya itu sendiri, dan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia itu harus di dukung dengan pemenuhan gizi, dan bukan hanya anggaran saja tapi bagaimana cara membangunnya. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah perusahaan atau Instansi/Lembaga. Dengan permasalahan yang ada saat ini kita harus sigap untuk melihat masalah yang terjadi saat ini yaitu permasalahan Stunting.

Stunting masih menjadi masalah besar di negeri Indonesia, dikutip dari laman BKKBN.go.id, Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak, karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurannya.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang di tandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang di tetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2018 menemukan 30,8% mengalami Stunting, walaupun Prevalensi Stunting menurun dari angka 37,2% pada tahun 2013.

Saat ini pemerintah bahkan dari instruksi Presiden RI lewat Perpes Nomor 72 tahun 2021 terus berupaya agar kedepannya masalah stunting di Indonesia akan dapat terlaksana. Dengan target penurunan angka stunting yaitu 14% di tahun 2024, hal ini bukanlah suatu yang mudah dapat kita capai tetapi dengan adanya suatu target yang di tetapkan sekiranya jika kedepannya tidak mencapai 100%, akan tetapi pemerintah akan terus berupaya mencapai target yang telah di tentukan oleh Presiden.

Meningkatnya angka stunting saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi pandemi COVID-19 dimana semakin banyak keluarga yang jatuh miskin dan keluarga yang sudah miskin semakin bertambah miskin. Dari laman wawancara Kompas TV pada tanggal 12 November 2021, pada tahun 2021 penderita stunting mencapai 2 juta anak yang menderita stunting, yang di akibatkan karena kurangnya pemenuhan gizi bagi anak-anak di karenakan orangtua kesulitan mencari kerja dan makanan di masa pandemi, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga atau tidak mengikuti anjuran makanan bergizi untuk keluarga karena adanya keterbatasan terkait akses,

ketersediaan, dan keterjangkauan bahan makanan sehat.

Survei daring menunjukkan bahwa kebutuhan pangan semakin tidak aman: 36 % dari responden menyatakan bahwa mereka “sering kali” mengurangi porsi makan karena masalah keuangan (UNICEF, 2020). Hilangnya pendapatan rumah tangga meningkatkan risiko anak mengalami kurus dan kekurangan zat gizi mikro padahal hal tersebut sangat membahayakan. Risiko kematian pada anak stunting hampir 12 kali lipat lebih tinggi daripada risiko kematian pada anak dengan gizi baik. Anak-anak yang pulih dari gizi buruk mungkin akan terus mengalami masalah perkembangan dan pertumbuhan selama hidupnya (UNICEF, 2020).

Dalam hal ini peran Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan serta Desa di harapkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, mampu menjalankan setiap tupoksi serta mampu berkoordinasi dalam membantu percepatan penurunan angka stunting. Sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa yang menjadi pelaksana dalam menangani atau mengikat kendali atas pencegahan Stunting yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sesuai dengan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 yaitu di ketuai oleh kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi anak lebih rendah dari standar usianya. Dari data yang saya dapatkan

dari Pusat Penyuluhan Sosial Kemnetrian Sosial, Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019, persentase stunting di Indonesia adalah 6,6% dimana angka tersebut berada diatas ambang batas WHO yakni 5% (Pikiran Rakyat, 25 Januari 2021). Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) di 34 provinsi di Indonesia pada 2019 menunjukkan angka Stunting pada balita mencapai 27,67% (Litha, 2020). Oleh karena itu, Indonesia masuk dalam daftar Negara dengan status gizi buruk versi WHO.

Adapun penyebab Stunting atau asal mulanya terjadi stunting, awal mulanya Stunting itu di tangani dari 1000 Hari Pertama kehidupan, di mulai dari calon ayah dan Calon ibu, yang di mana di sebabkan dari adanya hamil di luar nikah, bahkan ada yang minum obat-obatan. Dan pencegahannya dimulai dari awal pertama kehidupan benih tersebut. Menurut data dari WHO, di seluruh dunia, 178 juta anak di bawah usia lima tahun diperkirakan mengalami pertumbuhan terhambat karena stunting. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Bagi UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis), hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga kerap kali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk. Selain itu, efek jangka panjang yang disebabkan oleh stunting dan

kondisi lain terkait kurang gizi, acap kali dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Berikut ini adalah gejala Stunting; Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya, Berat badan rendah untuk anak seusianya, Pertumbuhan tulang tertunda. Dampak Stunting umumnya terjadi karena diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama anak. Hitungan 1.000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jika pada rentang waktu ini, gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin. Pada usia 1.000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dirinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan jabang bayi yang ada dalam kandungannya.

Percepatan penurunan angka Stunting di Indonesia sementara di laksanakan daya upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penderita Stunting, lewat Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 di dalamnya menegaskan bahwa yang punya kewenangan akan mengatasi permasalahan itu dari Pihak BKKBN di jelaskan bahwa sebagai pelaksana

tugas yaitu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun yang menjadi ruang lingkup Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri Kesehatan. Adapun di Sulawesi Utara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Utara yang merupakan Organisasi Vertikal Pemerintah dan Bertanggungjawab Kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam melaksanakan sebagian tugas BKKBN, jadi setara Kabupaten BKKBN punya Kewenangan tersendiri, tapi dalam Instansi di Kabupaten BKKBN adalah Dinas PP dan KB daerah kabupaten sangihe.

Untuk upaya pelayanan kesehatan dasar diarahkan pada peningkatan kesehatan dan status gizi anak sehingga terhindar dari kematian dini dan mutu fisik yang rendah. Pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kesehatan dengan penanganan yang cepat dalam masalah kesehatan, utamanya masalah gizi. Oleh karenanya pelayanan kesehatan berperan dalam perbaikan status gizi (BKKBN.go.id), dan program dari BKKBN itu diantaranya ada yaitu Penyuluhan atau pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat dan program Tim pendamping Keluarga, serta Program Esimil (Elektronik siap Hamil).

Diliput dari artikel di tribun manado Stunting menjadi masalah nasional yang memerlukan penanganan serius yang diupayakan setiap tahun mengalami penurunan, hal ini juga menjadi tanggungjawab Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (PP dan KB) menjadi

masalah nasional yang memerlukan penanganan serius yang diupayakan setiap tahun mengalami penurunan, hal ini juga menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB). Kepala Dinas PP dan KB Kepulauan Sangihe yang baru di lantik Dr Yopi Thungari menjelaskan Dinas PP dan KB tidak saja memiliki tanggungjawab dalam menekan pertumbuhan penduduk, namun berupaya dalam penanganan stunting. "Kalau untuk program Dinas PP dan KB kita tetap Fokus untuk pengendalian penduduk dan masalah stunting, sesuai dengan evaluasi selama ini masalah stunting dipengaruhi pernikahan yang tak terencana terutama bagi kelompok remaja sangat beresiko," ucapnya. Selaku dinas teknis dalam penanganan Stunting telah dibentuk Tim pendamping keluarga di setiap kampung kelurahan yang beranggotakan tiga orang." untuk penanganan Stunting memang kami sudah membentuk Tim pendamping keluarga mereka bertugas untuk mendampingi keluarga dalam pola asuh anak serta pemenuhan gizinya sehingga tidak berisiko Stunting," tambah Kadis. Dokter Yopi Thungari menambahkan sesuai program kerja Dinas PP dan KB tahun 2022 untuk pengendalian penduduk tetap dilakukan dengan pelayanan metode alat kontrasepsi bagi pria dan wanita. (nel)

Adanya program dan permasalahan dari pemerintah sendiri, serta di tandai dengan adanya permasalahan Isu Nasional mengenai Stunting membuat saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana cara pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan bahkan Kelurahan dan Desa serta bagaimana cara

mereka untuk menjalankan program-program yang sudah di buat untuk mencegah dan mengatasi Stunting, Oleh karena itu dari data yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2018 sebesar 22,99%, tahun 2019 sebesar 17,71, tahun 2020 13, 31, dan pada tahun 2021 ada 8,30% kasus ini menurut data dari Dinas Kesehatan.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul "STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI STUNTING DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (STUDI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SANGIHE)". Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan Penelitian ini dirumuskan : Apa dan Bagaimana bentuk dari Strategi Pemerintah dalam mengatasi Stunting di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penelitian Terdahulu mengambil tulisan Tabita Trifena Simorangkir, Novie R Pioh, Alfons Kimbal (2021). Mengenai Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara.. bahwa Standard dan Sasaran Kebijakan, Program Generasi Berencana ini merupakan Program Unggulan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Sasaran dari program ini belum tepat sampai ke seluruh remaja dan tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui dari program Generasi Berencana, Sumber Daya, BKKBN sudah menjalankan program ini semestinya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan remaja, sosialisasi,

penyuluhan, pembinaan, bahkan turun ke sekolah-sekolah dan masyarakat, akan tetapi masih banyak remaja yang belum terpapar akan program ini secara menyeluruh karena masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengelola program GenRe ini, serta dukungan finansial dalam membiayai eksistensi program ini juga sangat minim. Selain masalah dana, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat implementasi program GenRe,

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti ambil yaitu bagaimana melihat bahwa pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki peran penting dalam suatu pembangunan manusia, dan peneliti mau melihat bagaimana nantinya dari pemerintah sendiri dalam penanganan masalah Sumber daya itu sendiri, yaitu melihat sosialisasi yang di laksanakan oleh pihak BKKBN dalam pencegahan stunting, dan juga lokasi yang berbeda juga yaitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Herryanto Sabaru, Daud Liando, Neni Kumayas (2018), berjudul Kinerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota Manado Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dharma, pada BKKBN Kota Manado dapat dikatakan bahwa secara umum kinerja dari BKKBN Kota Manado Sudah efektif, terlihat dari tenaga kerja yang cukup memadai serta prestasi kerja yang diukur dari terlaksananya program-program tahunan walaupun tahun 2016 lebih besar nilai pengguna KB daripada tahun 2017 namun secara keseluruhan program kerja

terlaksana dengan baik. Serta dalam kemampuan pegawai dalam memanfaatkan peralatan kantor dimana terdapat saran prasaran yang disediakan Dinas BKKBN Manado cukup memadai. Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti ambil bagaimana peneliti melihat Program-Program yang ada pada BKKBN sendiri dalam hal ini selain program Keluarga Berencana ada pula Program terkait masalah mengatasi stunting dan peneliti mau melihat bagaimana nantinya dari pemerintah sendiri dalam penanganan masalah tersebut. Untuk itu peneliti mau melihat dari Penelitian Terdahulu untuk menjadi Acuan dalam Penelitian dengan Melihat Program-Program dari BKKBN sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara wawancara. Metode Penelitian Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian Lapangan adalah penelitian dilakukan secara langsung pada suatu instansi pemerintah atau lembaga-lembaga terkait strategi Pemerintah dalam mengatasi Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian Pustaka adalah penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan serta membaca beberapa literatur maupun tulisan ilmiah lainnya dan buku-buku yang mempunyai kaitan dengan materi pembahasan.

Metode penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode Postpositivistik

karena berlandaskan filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola). Metode Penelitian sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yang suatu penelitiannya kontekstual menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat Kualitatif. Menurut Mogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008 ; 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Stunting di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Suatu Strategi sangat di butuhkan dalam merencanakan suatu kegiatan maupun suatu Program, dalam hal ini di dalamnya ada pemerintah sebagai satuan aparat untuk menjalankan kegiatan maupun program bahkan strategi tersebut. Oleh karena itu di dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan strategi perencanaan mereka bekerja sama dengan beberapa instansi terkait di Daerah untuk mengatasi permasalahan stunting yaitu dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Daerah Kabupaten kepulauan sangihe lewat program dari BKKBN sendiri mereka yaitu dengan cara pencegahan stunting yang dilakukan sejak dari usia kandungan 0-59 bulan (sampai dengan

kurang lebih 5 tahun). Dengan hal ini kiranya dapat menekan laju pertumbuhan angka stunting di Indonesia.

Pada dasarnya peran dari Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri sangat di perhitungkan karena dimana untuk mewujudkan keluarga serta anak yang sehat dalam sebuah keluarga diperlukan suatu tindakan yang benar-benar atau nyata di lakukan untuk menciptakan generasi yang unggul 10-20 tahun kedepan. Dan visi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri yaitu “terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang Berkualitas Serta Berdaya Saing”. Untuk mencapai visi tersebut pastilah membutuhakn suatu strategi atau program dalam mencapai visi tersebut demi kebaikan kita bersama.

Strategi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di dalamnya terdapat kegiatan atau program BKKBN yang di instruksikan langsung lewat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 , sangatlah mempengaruhi jalannya suatu program dalam pelaksanaannya yaitu Strategi yang di lihat dari bagaimana bentuk dari Penentuan Rencana, Seperti apa bentuk Keterlibatan atau partisipasi pemimpin setiap Instansi dalam penanganan stunting di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan seperti apa program-program baik jangka panjang dan jangka pendek yang telah dan akan di laksanakan maka peneliti mengacu pada 3 aspek startegi yaitu:

1. Startegi Penentuan Rencana

Strategi Penentuan Rencana, adalah sebuah strategi dimana sebelum menjalankan suatu rencana

atau program terlebih dahulu kita melihat bagaimana penentuan rencana yang akan di rencanakan oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kadis DPPKB dapat di ketahui semua bagaimana penentuan rencana secara keseluruhan dari pihak Dinas PPKB sendiri yaitu di susun melalui Renstra Atau Rencana Startegi yang berlaku selama 5 tahun dan setelah itu, dibuatlah penjabarannya pertahun yaitu Rencana kerja, dan juga melihat dari Aspirasi Masyarakat lewat Musrembang di berbagai Kampung/desa , Kelurahan maupun sampai kecamatan, dan juga melihat Isu-Isu Nasional, dalam hal ini peneliti melihat bahwa penentuan rencana yang sudah di rencanakan itu tidak lepas dari adanya isu-isu Nasional saat ini yaitu dengan adanya Isu terkait permasalahan Stunting, Stunting sendiri ternyata juga masuk dalam penentuan Rencana Strategis.

2. Strategi Keterlibatan Pemimpin Puncak/ Pemimpin setiap Instansi

Strategi dilihat juga dari bagaimana keterlibatan seorang pemimpin dalam mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi di pemerintahan peran serta partisipasi dari pemimpin sangatlah berpengaruh dalam keterlaksanaannya suatu Rencana, baik dalam Bentuk Program maupun dalam bentuk Kegiatan, sejauh mana keterlibatan pemimpin puncak dalam penanganan Stunting serta juga bagaimana koordinasi dengan pihak instansi pemerintah lain terkait tupoksi masing-masing dalam penanganan atau pencegahan

Stunting di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Adapun keterlibatan pemimpin yang berlangsung atau dalam hal ini penanganan Stunting bersifat lintas Sektor yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe tugasnya meliputi : Pembangunan Keluarga sejahtera di dalamnya ada aprogram yang namanya Pencegahan Stunting, jadi pihak Dinas PP dan KB di daerah beregrak dalam pemberian Penyuluhan dengan sasaran; Calon Pengantin yang mau punya anak, Keluarga yang punya ibu hamil, Ibu pasca melahirkan, Keluarga dengan yang punya balita 0-5 tahun.
2. Dinas Kesehatan Sangihe tugasnya meliputi : Bekerjasama dengan Pihak Puskesmas, khusus pengukuran badan dan pengimputan data stunting, jadi Data stunting di tentukan dari dinas kesehatan itu sendiri, tugas yang lain juga adalah lewat puskesmas memberikan bantuan susu kepada penderita Stunting dan melakukan Posyandu di setiap Kelurahan.
3. Dinas Sosial Daerah Kabupaten Sangihe tugasnya Meliputi : Pemberian bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, karena di mana untuk membesarkan anak dan mencukupkan kebutuhan keluarga harus memiliki kebutuhan yang mencukupkan, oleh karena itu peran dinas sosial dalam penanganan Stunting sangat juga berpengaruh lewat memberikan

bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu.

4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sangihe tugasnya meliputi : melakukan koordinasi setiap program lewat rapat yang di laksanakan, dan kemudian di susun dalam bentuk perencanaan dan agar kegiatan tersebut dapat di evaluasi.

3. Program Organisasi

Program dari setiap organisasi sangat di butuhkan untuk melihat bagaimana cara penanganan atau bagaimana cara mengatasi permasalahan stunting, tidak cukup hanya dengan penentuan perencanaan, keterlibatan pemimpin tapi juga strateginya juga membutuhkan tindakan nyata atau kegiatan dalam mencegah stunting itu pada program-program atau kegiatan berikut ini hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait program yang di jalankan oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu dengan Bapak Kadis DPPKB Daerah Kabupaten Sangihe.

“ secara keseluruhan ada 4 program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tapi khusus penanganan stunting masuk pada program yang ke 3 yaitu Program Pembangunan Keluarga Sejahtera meliputi; Pembinaan Keluarga, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pencegahan Stunting, dan pada dasarnya tidak ada program yang di prioritaskan semua program saling menunjang sesuai denan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dimulai dengan Program yang sudah di jalankan pada tahun 2021 yaitu pendataan keluarga sehingga kami mendapatkan data yang real akurat mengenai situasi dan kondisi satu kabupaten. Terkonfirmasi dari dinas kesehatan angka stunting pada tahun 2020 sebesar 13% dan tahun 2021 sudah turun sebanyak 8% angka stunting dan kita sudah capai target di bawah nasional, capaian juga di renstra seperti itu dan kami mau stunting bisa sampai 0% dan kami melakukan segala daya upaya agar stunting dapat teratasi.

Kepala DPPKB Sangihe juga menuturkan tentunya program jangka panjangnya meliputi uapayah Pencegahan, sekarang di lakukan bahwa setiap kampung selain ada Tim Percepatan juga di bantu lewat Tim Pendamping keluarga, di tiap kampung itu masing-masing ada unsur Kesehatan, unsur PKK, unsur Kader. Dan tim ini sudah di bentuk dari bulan desember 2021 dan sudah bekerja. Apa tugas dari tim pendamping keluarga? Yaitu: Identifikasi Keluarga yang beresiko Stunting artinya keluarga yang belum punya anak yang stunting tetapi beresiko siapa saja itu ada 4 kategori :1. Calon pengantin yang mau punya anak, 2. Keluarga yang punya Ibu Hamil, 3. Ibu pasca melahirkan, 4. Keluarga yang punya balita 0-5 tahun.

Terhadap 4 jenis ini, dari Tim Pendamping Keluarga melakukan Pendampingan sesuai dengan tugas masing-masing; kesehatan memperhatikan bidang kesehatan memastikan calon ibu dalam keadaan sehat, apakah tidak anemia, dan ketika di temukan ibu yang kurang sehat akan di lakukan konvergensi pemberian vitamin dan juga tugas kesehatan juga memberikan

pengarahan untuk tidak dahulu hamil, sampai keadaan ibu ini membaik, lalu PKK memperhatikan dan melihat aturan makan sehari-hari member motivasi makan sayur, melihat yang belum dapat bantuan makanan, dan pemberian beras serta memperhatikan lingkungan tempat tinggal sekitar keluarga, Kadernya dilihat dari sisi KB, berkaitan dengan data penduduk, dan pengendalian penduduk. Ketiganya bersinegri dan tetap satu Tim.”

Angka stunting secara keseluruhan di Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe dari tahun 2018-2021 sumber dari dinas kesehatan yaitu ; Tahun 2018 sebesar 22,99%, Tahun 2019 sebesar 17,71%, Tahun 2020 sebesar 13,31%, dan Tahun 2021 sebesar 8,30% . Menurut WHO angka Stunting dikatakan rendah ketika ia berkisaran pada berkisaran 5% dan data angka prevelensi stunting di Sangihe dari tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, berkisaran hingga mencapai 22, 99%, dan ini adalah angka stunting yang sangat tinggi, kemudian pada tahun 2019 angka stunting mengalami penurunan yang begitu signifikan yaitu berkisaran 5% yaitu pada angka 17,71% hal ini menjadi kabar yang baik di mana ada perubahan yang terjadi atas angka stunting, kemudian pada tahun 2020 angka stunting juga mengalami penurunan hingga 13,31%, hingga sampai pada tahun 2021 hingga saat ini angka stunting berkisaran 8,30% ini adalah data angka yang sangat baik karena dimana strategi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe sudah bisa mulai di terapkan dengan baik, kedepannya di harapkan mampu sampai pada angka 0,00% untuk Daerah kabupaten Sangihe, lewat

program dan instruksi presiden dalam hal ini perpes no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan berikut ini data stunting Kabupaten Kepulauan Sangihe perhitungan bulan Februari Tahun 2022 meliputi 5 Kecamatan yang terdiri dari 2 kecamatan yang penanganan atau pencegahana stuntingnya tidak terlalu banyak, yaitu di Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Tabukan tengah, sedangkan yang 3 Kecamatan masih salam jumlah yang banyak angka Stunting.

Dari data Stunting diatas penulis mengambil sampel 5 kecamatan dan 2 kecamatan dengan angka terendah, 3 lain dengan angka stunting yang cukup tinggi yaitu Kecamatan Tabukan Tengah dengan angka stunting sebanyak 52 kasus, Kecamatan Tahuna sebanyak 72 Kasus, dan 3 kecamatan dengan angka tidak terlalu tinggi yaitu Kecamatan Tahuna Timur dengan 16 kasus, Kecamatan Tahuna Barat dengan 12 kasus, dan kecamatan Tabukan Utara dengan 11 kasus.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut ini akan penulis jelaskan mengenai Pembahasan hasil penelitian, yakni berisikan semua rangkuman dari hasil keseluruhan penelitian tentang Startegi Pemerintah dalam mengatasi Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dapat kita ketahui bersama bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan di dapati strategi dari BKKBN di dalamnya ada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sangihe, dalam kegiatannya yakni sebagai Pencegahan Stunting sudah begitu baik, namun ada beberapa strategi program yang di jalankan belum sepenuhnya efektif, dinas PP &

KB adalah salah satu Dinas yang mengatur tentang kesejahteraan keluarga Indonesia, dalam hal ini kesehatan anak dan ibu dalam sebuah keluarga sangatlah penting untuk dilakukan apalagi saat ini dengan adanya isu Nasional tentang Percepatan Penurunan Stunting yang di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 menjadi sebuah acuan untuk bertindak serta menjalankan strategi. Lebih lagi kedepannya dari pihak BKKBN dalam hal ini dinasi PP dan KB Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih sigap lagi dalam menjalankan setiap penyuluhan pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), pelatihan bagi Tim Pendamping Keluarga, dan juga bagaimana memperhatikan kesejahteraan dari para Tim pendamping Keluarga harus lebih di tingkatkan lagi meski yang saya lihat sudah baik. Dan juga lebih berkoordinasi lagi dengan pemangku kepentingan dalam hal pengentasan stunting agar data di lapangan itu sinkron dengan semua dinas atau lintas sektor terkait, dan perlunya koordniasi dengan pihak pemerintah kampung agar dapat berpartisipasi dalam pengentasan stunting karena dimana yang saya temukan di lapangan ada salah satu kampung dimana seorang Kapitalaung (kepala desa) yang menentang dan tidak ada sama sekali memberikan penanganan serta pembiayaan sedikit terkait dengan isu nasional ini , sehingga ada salah satu TPK memberikan pandangannya bagaimana drai pihak pemerintah desa tidak ikut serta dalam penanganan stunting akan tetapi memberikan perintah untuk menghapus data stunting yang ada, kemudian selanjutnya karena permasalahan ini menjadi isu nasional bagi dinas terkait/lintas sektor terkait dalam hal ini

Dinas Kesehatan dalam hal pemberian bantuan susu kepada bayi sudah baik dilaksanakan tapi belum sepenuhnya menjawab setiap keperluan keluarga.

Dari penelitian di masyarakat mengenai penanganan stunting belum sepenuhnya terjalankan dengan baik atau belum optimal karena masih ada masyarakat yang tidak peduli akan posyandu, dan juga dari pemerintah sendiri sudah memberikan bantuan tapi yang di rasakan masyarakat belum memenuhi kehidupan mereka, menurut penulis belum semua di jalankan.

Penutup Kesimpulan

1. Kesiapan dalam penentuan Rencana dari BKKBN didalamnya ada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam kegiatan strategi pemerintah dalam mengatasi stunting sudah baik, karena dalam perencanaanya melihat unsur pemerintah, instansi-instansi terkait serta masyarakat dan melihat isu-isu nasional.
2. Dilihat dari Keterlibatan pemimpin dalam proses pencegahan bahkan penanganan Stunting sudah cukup baik, karena dari pemimpin sendiri sudah mengetahui Tugas dan kewenangan dalam mengatasi permasalahan Stunting, Pada dasarnya sesuai dengan wawancara yang saya lakukan dengan beberapa Camat di kecamatan yang berbeda, bahwa pihak Kecamatan sudah berkoordinasi sampai kepada pihak Kampung dalam hal ini Kepala Desa kedepannya harus lebih meningkatkan lagi koordinasi dan mengetahui setiap tupoksi masing-masing yaitu sebagai kepala Desa.

3. Dalam Program-program yang ada, sudah baik tapi pada koordinasinya sebagian tiap TPK belum terlalu paham betul dengan kegiatan atau Program yang akan di jalankan karena sebagian khususnya Program menggunakan Aplikasi dan dari TPK ada sedikit pengeluaran jaringan dalam menjalankan salah satu kegiatan atau program-program yang ada dari Pihak BKKBN sendiri, serta permasalahan jaringan yang menyulitkan TPK dalam menjalankan programnya, serta dari wawancara yang di dapatkan para Tim pendamping Keluarga tidak mendapatkan Gaji karena Keterlibatan mereka bersifat Pengabdian Kemanusiaan.

Saran

1. Sangat di harapkan kepada BKKBN dalam hal ini di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe dalam menentukan rencana kedepan agar tetap dapat lebih siap lagi dalam penentuan rencana, agar rencana yang di susun itu serta merta semua bagi penanganan permasalahan stunting di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Untuk keterlibatan pemimpin puncak dan lintas sektor menurut saya harus sigap lebih cekatan dan siap untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan dalam hal koordinasi dengan setiap Lintas sektor dan di harapkan dengan adanya koordinasi yang baik tidak akan menyebabkan perdebatan dari TPK dan setiap pemangku kepentingan atau pemimpin. Dan setiap pemimpin di harapkan mampu mengerti dan memahami setiap tupoksi masing-masing

dalam penanganan stunting di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Diharapkan bagi setiap Program jangka panjang maupun jangka pendek yang ada baik program dari BKKBN dan serta Dari DPPKB Sangihe semuanya dapat di jalankan dengan sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan khususnya bagi pelatihan untuk menjalankan program Esimil (Elektronik siap hamil), serta kesiapan dri setiap TPK dan kesungguh-sungguhan dalam menjalankan program, dan masukan saran bagi pihak Dinas agar dapat menyiapkan dana atau honor/gaji para Tim Pendamping Keluarga agar dapat menjalankan setiap program di tunjang dengan kesejahteraan para Tim Pendamping Keluarga.

Daftar Pustaka

- Bugin, Burhan. Metode penelitian Kuantitatif. Jakarta : Prenada Media*
- Siagian, S. P. ,Eksekutif yang efektif , Jakarta : gunung agung, 1986*
- Cresweel, John w. 2009. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Cresweel, John W. 2012 Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.*
- Fakih, Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar*
- Moleong, Lexi J, 2008, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdarkarta*

- Sedarmayanti, (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju
- Siagian, Sondang. P.2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : ALFABETA
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah :Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti.
- Goldworthy dan Ashley(1996), *Aturan dasar perumusan strategi*, Gajah Mada university press: Yogyakarta.
- Gibson, Ivancevich, Donelly (1996), *organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina rupa aksara: Jakarta.
- Sumber Lain :**
- Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021, Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- UU no 25 thun 2004 sisitem perencanaan pembangunan nasional
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (2019). Stunting Hingga Obesitas Masih Menghantui Indonesia
- K. marrus.(2002) desain penelitian manajemen strategi .rajawali press: jakarta
- 19 Cameron and Quinn(1999) diagnosing and changing organizational culture Based on the competing values framework, Addison Wesley Mass:Reading
- Tribun Manado.co.id Artikel ini telah tayang, dengan judul Pernikahan Dini Dampak Penyumbang Stunting di Kabupaten Sangihe Sstunting-di-kabupaten-sangihe.
- Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susuan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Jurnal Dinamika Pemerintahan, Vol.2, No. 2 Agustus 2019 hal. 152-168, dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Idtesis.com (2020): Teori lengkap deteksi dini stunting menurut teori dan pendapat para ahli (<https://idtesis.com/teori-lengkap-deteksi-dini-stunting-menurut-teori-dan-pendapat-ahli-dan-contoh-tesis-tentang-deteksi-dini-stunting>)
- BKKBN (17/02/2021) : Mencari Strategi Percepatan Pencegahan Stunting (<https://www.bkkbn.go.id>)
- Studi Kepustakaan Dan Kerangka Pikir konsep Ilmu Pemerintahan (BAB2) (<http://repository.uir.ac.id/449/2/BAB%20II.pdf>)
- Riset Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan 2018 (litbang.kemkes.go.id) World Health Organization (<https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>)
- Governancejournal.Unsrat.ac.id (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance>)